

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Almi, Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo. Jakarta.
- Dardji Darmohardjo, Shidarta, 2006, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung.
- Hanif Nurcholis, 2010, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Hartono Hadisapoetro, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grapindo, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Safa'at dan M. Ali, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, RemajaRosdakarya, Bandung.
- Mahendra Kurniawan, dkk, 2007, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Maria Farida Indarati Soeprapto, 1998, *Ilmu perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Muhammad Yasim, Laode Ruditan dkk, 2017, *Anotasi Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), Jakarta.

Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2011, *Ilmu Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Wiyono, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Garfika, Jakarta.

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sadjijono, 2011, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*, LasBang PRESSindo, Yogyakarta.

SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Liberty.

Sjahrhan Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, Alumni.

Soemitro, 1998, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Reka Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Titik TriwulanT dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Tjakranegara, Soegiatno.1994, *Hukum Acara PTUN*, Jakarta. Sinar Grafika.

W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.



W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zairin Harahap, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, , Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## **C. Sumber Lainnya**

Andi Afriyanto, 2014, *Teori Administrasi Publik*, <http://andriraf.files.wordpress.com/2014/11/03-teori-ap.pdf/>.

Anita Marlin Restu Prahastapa, Lapon Tukan Leonard dkk, 2017, *Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara*, Diponegoro Law Journal-Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017.

Budiamin Rodding, 2016, *Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Tanjungpura Law Journal , Vol 1, Issue 1, January 2017.

Dika Yudanto, Nourma Dewi, *Sinkronisasi Undang-undang Administrasi Pemerintahan Dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia*, 2016, Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No.02 Agustus 2016-Januari 2017.

Kartika Widya Utama, 2015, *Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif*, Jurnal Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id.html>.

Khairani, 2015, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Ditinjau Dari Pengaturan Dan Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja Dengan Pemberi Kerja Dalam Hukum Ketenaga Kerjaan*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Ujang Abdullah, *Reformasi Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Berkaitan Dengan Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan*, <http://ptun-jakarta.go.id/html>.

Ujang Abdullah, *Upaya Administrasi dalam peradilan Tata Usaha Negara*, <http://ptun-palembang.go.id/html>

Yodi Martono Wahyunadi, 2016, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tatta Usaha Negara Dalam Konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

